

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 72.1 TAHUN 2023 TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 1. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);
- 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI

PANCASILA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI

PANCASILA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024.

KEDUA : Program Penyusunan Rancangan Peraturan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

KETIGA Pemrakarsa melaporkan secara berkala perkembangan

realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Sekretaris Utama paling sedikit 3

(tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Sekretaris Utama melakukan evaluasi perkembangan

realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaporkan hasil evaluasi kepada

Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan

ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 72.1 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2024

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
DEP	UTI BIDANG HUKUN	M, ADVOKASI, DAI	N PENGAWASAN REGUI	LASI			
1.	Rancangan	Direktorat	Direktorat Analisis		1. Perumusan arah	1. Direktorat	Oktober 2024
	Peraturan Badan	Analisis dan	dan Penyelarasan		kebijakan	Analisis dan	
	Pembinaan	Penyelarasan	menyelenggarakan		internalisasi dan	Penyelarasan;	
	Ideologi Pancasila		fungsi, salah satunya		institusionalisasi	dan	
	(BPIP) tentang		adalah merumuskan		Pancasila di	2. Stakeholder	
	Arah Kebijakan		arah kebijakan		bidang hukum,	terkait.	
	Internalisasi dan		internalisasi dan		advokasi, dan		
	Institusionalisasi		institusionalisasi		pengawasan		
	di Bidang		Pancasila di bidang		regulasi;		
	Hukum,		hukum, advokasi,		2. Penyelenggaraan		
	Advokasi, dan		dan pengawasan		institusionalisasi		
	Pengawasan		regulasi. Arah		Pancasila		
	Regulasi		kebijakan		terhadap hukum		
			internalisasi dan		nasional agar		
			institusionalisasi ini		selaras dengan		
			sangat penting		dasar negara;		
			mengingat situasi		3. Pemberian		

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			dan kondisi bangsa		rekomendasi		
			Indonesia tengah		berdasarkan hasil		
			mengalami		pengawasan dan		
			penurunan		kajian kepada		
			kepercayaan		lembaga tinggi		
			terhadap ideologi		negara,		
			Pancasila serta		kementerian/lem		
			masih banyaknya		baga, dan		
			produk hukum dan		mengenai regulasi		
			peraturan		yang		
			perundang-		bertentangan		
			undangan yang		dengan nilai-nilai		
			belum sesuai dengan		dasar Pancasila;		
			Pancasila.		4. Pelaksanaan		
			Internalisasi dan		advokasi		
			institusionalisasi		pembinaan		
			bertujuan agar nilai-		ideologi Pancasila		
			nilai Pancasila		(PIP) pada		
			diyakini sebagai		lembaga tinggi		
			sebuah kebenaran		negara,		
			kemudian diamalkan		kementerian/lem		
			dalam kehidupan		baga, organisasi		
			sehari-hari oleh		sosial politik, dan		
			seluruh anggota dan		komponen		
			lembaga		masyarakat		
			negara/masyarakat.		lainnya; dan		
			Dengan pemahaman,		5. Penanganan		
			penghayatan dan		penyelesaian dan		
			pengamalan		penanggulangan		
			Pancasila yang baik		masalah dan		

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			di masyarakat, maka diharapkan kualitas produk hukum dan peraturan perundang-undangan juga semakin baik dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).		kendala dalam PIP;		
2.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pencasila Dalam Pengharmonisasi an Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	Dengan diundangkannya Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila, penyelarasan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Analisis dan Penyelarasan, maka Perubahan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020 juga perlu dilakukan		 Penyempurnaan mekanisme penyelarasan; dan Pola hubungan kerja dengan stakeholder terkait; 	 Direktorat Analisis dan Penyelarasan; dan Stakeholder terkait. 	Agustus 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan Yang Dibentuk di		penyesuaian utamanya dalam hal mekanisme pelaksanaan penyelarasan dan pola hubungan kerja direktorat dengan stakeholder terkait.				
DED	Daerah UTI BIDANG PENGK	 Δ ΙΙΔΝ ΓΙΔΝ ΜΑΎΕ) DI				
3.	Rancangan	Direktorat	Menguatkan Arah	Peraturan Presiden	Pengertian,	BPIP, lembaga	Maret 2024
	Peraturan BPIP	Pengkajian	Kebijakan PIP	Nomor 7 Tahun	kegunaan, muatan	tinggi negara,	
	tentang Arah	Kebijakan	sebagai dokumen	2018 tentang BPIP	dokumen,	kementerian/lem	
	Kebijakan	Pembinaan	perencanaan		sosialisasi,	baga, organisasi	
	Pembinaan	Ideologi	kebijakan PIP bagi		implementasi dalam	sosial politik,	
	Ideologi Pancasila	Pancasila	BPIP, lembaga tinggi		peta jalan PIP,	komunitas, dan	
			negara, K/L,		pengendalian dan	komponen	
			ormas/orsospol,		evaluasi arah	masyarakat	
			komunitas dan		kebijakan PIP	lainnya.	
			komponen				
1	Donoongon	Direktorat	masyarakat lainnya	1. Peraturan	Donatanan Ctanalar	1. Direktorat	Juli 2024
4.	Rancangan Peraturan BPIP		- Sebagaimana Peraturan BPIP	Presiden Nomor 7	Penetapan Standar Kompetensi	Pengkajian	Juli 2024
	tentang Standar	Pengkajian Implementasi	Nomor 5 Tahun	Tahun 2018	(Pembelajaran)	Implementasi	
	Kompetensi	Pembinaan	2021 dimana	tentang BPIP;	materi dan metode	Pembinaan	
	(Pembelajaran)	Ideologi	nomenklatur	2. Peraturan BPIP	PIP pendidikan	Ideologi	
	(i ciii)ciajaraiij	Ideologi	Homenkiatui	2. I Clatulali Di II	i ii pendidikan	lucologi	

No. Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
Materi dan Metode Pendidikan Formal	Pancasila	Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan standar materi. Standar materi ini juga merupakan amanat dari pasal 31 ayat d Perpres Nomor 7 Tahun 2018, yakni perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila Pada tahun 2021 sebelum dikeluarkannya Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, Direktorat Standardisasi Materi dan	Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun	formal.	Pancasila; 2. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 3. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan 4. Stakeholder terkait.	

No. Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
		Metode Formal, Nonformal dan Informal telah mengeluarkan output: Capaian Kompetensi Standar Materi dan Metode Pendidikan Formal Meskipun nomenklatur Direktorat telah berubah, capaian kinerja pada Renstra baru berubah merujuk kepada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2023 Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk-	2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			produk turunan yang bersumber output dimaksud. Bilamana akan dilakukan penyempurnaan output dimaksud, maka aturan akan menyesuaikan.				
5.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi dan Metode PIP Jenjang Pendidikan Formal (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Pergururuan Tinggi)	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	- Sebagaimana Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 dimana nomenklatur Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan standar materi Standar materi ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 7 Tahun 2018 pasal	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun	Penetapan Standar Materi dan Metode PIP Jenjang Pendidikan Formal (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Pergururuan Tinggi)	1. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. Direktorat Perencanaan, Standardisasi , dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 3. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;	Juli 2024

No. Judul Pemrakars	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	31 ayat d, yakni perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP. - Pada tahun 2021 sebelum dikeluarkannya Per-BPIP No.5 Tahun 2021, Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal telah mengeluarkan output: Buku Standar Materi dan Metode PIP Formal (PAUD-TK, SD, SMP, SMA dan Pergururuan Tinggi). - Buku Standar Materi dan Metode PIP Formal (PAUD-TK, SD, SMP, SMA dan Pergururuan Tinggi).	2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.		4. Stakeholder terkait.	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			Tinggi) merupakan output turunan dari Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar. Buku ini telah disebarluaskan ke berbagai sasaran pada tanggal 1 Juni 2022, namun belum mendapat legalitas Sementara pada tahun 2022, buku ini telah memiliki buku turunan dan output buku turunan ini telah mendapat pengesahan dari Kemendikbudriste k dengan dikeluarkannya SK Mendikbudristek				
			Nomor:067/H/P/				

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan		Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			2022 tentang Penetapan Buku Referensi (Nonteks) Utama Pendidikan Pancasila untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.					
6.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi dan Metode PIP pada Lingkup Organisasi Masyarakat (Nonformal)	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	- Sebagaimana Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 dimana nomenklatur Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan standar materi. Standar materi ini juga merupakan amanat dari Pasal 31 ayat d Perpres Nomor 7 Tahun	 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun	Penetapan standar materi dan metode PIP pada lingkup organisasi masyarakat (nonformal)	3.	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila; Direktorat Perencanaan, Standardisasi , dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan Stakeholder terkait.	Desember 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			2018, yakni perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP Pada tahun 2021 sebelum dikeluarkannya Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal telah mengeluarkan output: Buku Standar Materi dan Metode PIP Nonformal (Ormas) Meskipun nomenklatur Direktorat telah berubah, capaian kinerja pada Renstra baru berubah merujuk kepada Peraturan	2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			BPIP Nomor 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2023. Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produkproduk turunan yang bersumber dari output dimaksud. Bilamana akan dilakukan penyempurnaan output dimaksud, maka aturan akan menyesuaikan.				
7.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi dan	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan	- Sebagaimana PerBPIP Nomor 1 Tahun 2018 dimana	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP;	Penetapan standar materi dan metode PIP pada lingkup keluarga (Informal)	1. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan	Desember 2024
	Metode PIP pada Lingkup Keluarga (Informal)	Ideologi Pancasila	nomenklatur Direktorat Standardisasi	2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang		Ideologi Pancasila; 2. Direktorat	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			Materi dan	Rencana		Perencanaan,	
			Metode Formal,	Strategis BPIP		Standardisasi,	
			Nonformal dan	Tahun 2020-		dan	
			Informal yang	2024		Kurikulum	
			memiliki tugas	sebagaimana		Pendidikan	
			dan fungsi	telah diubah		dan Pelatihan;	
			penyusunan	dengan		dan	
			standar materi.	Peraturan BPIP		3. Pelaksanaan	
			- Standar materi ini	Nomor 3 Tahun		Pendidikan	
			juga merupakan	2023 tentang		dan Pelatihan	
			amanat dari Pasal	Perubahan Atas		Stakeholder	
			31 ayat d Perpres	Peraturan BPIP		terkait.	
			Nomor 7 Tahun	Nomor 1 Tahun			
			2018, yakni	2020 tentang			
			perumusan	Rencana			
			standardisasi	Strategis BPIP			
			materi dan bahan	Tahun 2020-			
			ajar metode PIP.	2024; dan			
			- Pada tahun 2021	3. Peraturan BPIP			
			sebelum	Nomor 5 Tahun			
			dikeluarkannya	2021 tentang			
			Peraturan BPIP	Organisasi dan			
			Nomor 5 Tahun	Tata Kerja BPIP			
			2021, Direktorat	sebagaimana			
			Standardisasi	telah diubah			
			Materi dan	dengan			
			Metode Formal,	Peraturan BPIP			
			Nonformal dan	Nomor 4 Tahun			
			Informal telah	2023 tentang			
			mengeluarkan	Perubahan atas			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			output: Buku Standar Materi dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila Informal (Keluarga). - Meskipun nomenklatur Direktorat telah berubah, capaian kinerja pada Renstra baru berubah merujuk kepada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2023. - Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk- produk turunan yang bersumber dari output	Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			dimaksud. Bilamana akan dilakukan penyempurnaan output dimaksud, maka aturan akan menyesuaikan.				
8.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi PIP Bagi Hakim	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	- Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, lementerian	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana	Penetapan standar materi dan bahan ajar PIP bagi Hakim	1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi , dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan Stakeholder terkait.	Maret 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk- produk turunan yang bersumber dari output dimaksud.	Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.			
9.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi PIP Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	- Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat	 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 	Penetapan standar materi dan bahan ajar PIP bagi ASN	 Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; Direktorat Pelaksanaan Pendidikan 	Maret 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila. - Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produkproduk turunan yang bersumber dari output dimaksud.	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun	rengaturan	dan Pelatihan; dan 3. Stakeholder terkait.	
				2021 tentang			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Organisasi dan Tata Kerja BPIP.			
10.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi PIP Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	- Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun	Penetapan standar materi dan bahan ajar PIP Bagi Anggota POLRI	1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; 3. Stakeholder terkait.	Desember 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			Duta Pancasila. - Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk- produk turunan yang bersumber dari output dimaksud.	Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.			
11.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi PIP Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	- Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP	Penetapan standar materi dan bahan ajar PIP bagi TNI	1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; 3. Stakeholder terkait.	September 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk- produk turunan yang bersumber dari output dimaksud.	Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP			
12.	Rancangan	Direktorat	- Berdasarkan	1. Peraturan	Penetapan standar	1. Direktorat	Maret 2024
	Peraturan BPIP	Pengkajian	Peraturan BPIP	Presiden Nomor 7	materi dan bahan	Perencanaan,	
	tentang Standar	Materi	Nomor 5 Tahun	Tahun 2018	ajar PIP bagi Kepala	Standardisasi,	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Materi PIP Bagi Kepala Daerah	Pembinaan Ideologi Pancasila	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi	tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan	Daerah	dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan 3. Stakeholder terkait	

No. Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
		kepastian terhadap produk- produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud.	Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.			
13. Rancangan Peraturan BPIP tentang Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Program Paskibraka	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	- Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, kementerian /	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan Presiden Nomor 51 tentang Program Paskibraka; 3. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun	Penetapan Standar Materi dan Bahan Ajar PIP Untuk Program Paskibraka	 Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan Stakeholder terkait. 	Maret 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk- produk turunan yang bersumber dari output dimaksud.	2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 4. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP			
14.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Materi PIP Bagi	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan	- Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP;	Penetapan Standar Materi dan Bahan Ajar PIP Bagi Diplomat	1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan	Juli 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Diplomat	Ideologi Pancasila	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum	2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan		Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan 3. Stakeholder terkait	
			untuk menjadi	Peraturan BPIP			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			kepastian terhadap produk- produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud.	Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.			
15.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Buku Referensi PIP Bagi Perguruan Tinggi	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	- Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, kementerian /	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 3. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun	Penetapan Buku Referensi PIP Bagi Perguruan Tinggi	1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan 2. Stakeholder terkait	Maret 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila Dengan demikian, output tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk- produk turunan yang bersumber dari output dimaksud.	2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020- 2024; dan 4. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP			
DEP	UTI BIDANG PENDI	DIKAN DAN PELAT	TIHAN				
16.	Rancangan Peraturan BPIP tentang	Direktorat Perencanaan, Standardisasi,	- Pancasila sebagaimana tercantum dalam	- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018	- Materi pokok berkaitan dengan Diklat PIP.	Aparatur negara;Organisasi	Juli 2024

Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kurikulum Pembinaan Ideologi Pancasila dan delatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan delatihan Pelatihan An diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbagaia; - dalam rangka penguatan pengaktan pengahaman, pengakan, dan pengaktan permasyarakat, berbangsa, dan pengaktan pengakan pengakan, dan pengakan peng	No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
Pancasila, perlu Pembinaan diselenggarakan Ideologi Pancasila		Pelatihan Pembinaan	Pendidikan dan	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus dipahami, ditegakkan, dan diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dalam rangka penguatan pemahaman, penegakan, dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila, perlu	Pembinaan Ideologi Pancasila; Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan	meliputi asas, sasaran, materi, pengajar, jenis, pelaksanaan, akreditasi, sertifikasi, basis data, dan	 Komponen masyarakat lainnya; Calon Paskibraka; Paskibraka; Purnapaskibra 	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			pendidikan dan	Nomor 4 Tahun			
			pelatihan	2023 tentang			
			pembinaan	Perubahan atas			
			ideologi Pancasila	Peraturan Badan			
			secara terencana,	Pembinaan			
			sistematis,	Ideologi Pancasila			
			terpadu, dan	Nomor 5 Tahun			
			berkesinambunga	2021 tentang			
			n yang didukung	Organisasi dan			
			dengan regulasi	Tata Kerja Badan			
			yang jelas dan	Pembinaan			
			tepat sasaran;	Ideologi			
			- regulasi	Pancasila;			
			pendidikan dan	- Peraturan Badan			
			pelatihan	Pembinaan			
			pembinaan	Ideologi Pancasila			
			ideologi Pancasila	Nomor 3 Tahun			
			yang diatur dalam	2022 tentang			
			Peraturan Badan	Peraturan			
			Pembinaan	Pelaksanaan			
			Ideologi Pancasila	Peraturan			
			Nomor 2 Tahun	Presiden Nomor			
			2020 tentang	51 Tahun 2022			
			Pendidikan dan	tentang Program			
			Pelatihan	Pasukan			
			Pembinaan	Pengibar Bendera			
			Ideologi Pancasila	Pusaka (Berita			
			sudah tidak	Negara Republik			
			sesuai dengan	Indonesia Tahun			
			dinamika	2022 Nomor 748)			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			lingkungan strategis lokal, nasional, dan internasional, sehingga perlu diganti.	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka			
SEK	RETARIAT UTAMA						
17.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun	Biro Hukum dan Organisasi	Lanjutan program penyusunan 2023	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-	1. Mengubah Pasal Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020	Seluruh pegawai BPIP	Desember 2024

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
Po Po	020 tentang embentukan roduk Hukum BPIP			undangan sebagaimana telah diubah beebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dalam Perundang- Undangan dan	tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP; 2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pembentukan Produk Hukum Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP.		

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
No.	Judul	Pemrakarsa		Pembinaannya; 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; dan 5. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan		Sasaran	
				Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan			
				Tata Kerja BPIP.			

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI